



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 249 TAHUN 2023

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KONTRAK ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DENGAN PT TANIKAYA MULTI AGRO DAN ANTARA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN PT SARI KRESNA
KIMIA TERKAIT KONSOLIDASI PENGADAAN PUPUK NITROGEN FOSFOR
DAN KALIUM (NPK) PADAT PRODUK DALAM NEGERI (PDN) SECARA
NASIONAL UNTUK KATALOG ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penandatanganan kontrak antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan PT Tanikaya Multi Agro dan antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan PT Sari Kresna Kimia, perlu adanya pendelegasian wewenangan penandatanganan kontrak kepada Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Kontrak antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan PT Tanikaya Multi Agro

dan antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan PT Sari Kresna Kimia terkait Konsolidasi Pengadaan Pupuk Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) Padat Produk Dalam Negeri (PDN) secara Nasional untuk Katalog Elektronik Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1031);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KONTRAK ANTARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH DENGAN PT TANIKAYA MULTI AGRO DAN ANTARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN PT SARI KRESNA KIMIA TERKAIT KONSOLIDASI PENGADAAN PUPUK NITROGEN FOSFOR DAN KALIUM (NPK) PADAT PRODUK DALAM NEGERI (PDN) SECARA NASIONAL UNTUK KATALOG ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendelegasikan kewenangan penandatanganan Kontrak antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan PT Tanikaya Multi Agro dan antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan PT Sari Kresna Kimia terkait Konsolidasi Pengadaan Pupuk Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) Padat Produk Dalam Negeri (PDN) secara Nasional untuk Katalog Elektronik Tahun Anggaran 2023 kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti
